

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan II 2024, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 4,81% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,96% (yoy). Dari sisi penawaran, perlambatan utamanya bersumber dari LU Pertambangan didorong oleh permintaan batu bara dari negara mitra dagang yang termoderasi, khususnya India. Hal ini didorong oleh hujan Monsoon yang turun lebih cepat dan berhasil meredakan heatwave, sehingga penyerapan batu bara untuk listrik lebih rendah dari perencanaan, yang juga disertai dengan tingginya produksi domestik batu bara India pada triwulan II. Permintaan Tiongkok juga tertahan, didorong oleh tingginya pasokan listrik dari PLTA akibat curah hujan yang tinggi menjadi alternatif pemanfaatan renewable energy, di samping kembali optimalnya produksi tambang batu bara di Shanxi pascapelaksanaan safety check menjadi sentimen tingginya produksi batu bara domestik Tiongkok. Sementara itu, tertahannya perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih dalam didorong oleh kinerja LU Pertanian, LU Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi yang tumbuh lebih tinggi. Dari sisi permintaan, deselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2024 terutama bersumber dari kinerja Konsumsi Pemerintah dan Net Ekspor yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Melambatnya kinerja konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh moderasi realisasi APBN dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di samping itu, melambatnya kinerja ekspor terutama bersumber dari menurunnya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama yakni India dan China di tengah harga Batu bara yang masih terkontraksi dan penguatan produksi domestik pada kedua negara tersebut. Meski demikian, perlambatan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh kinerja konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih tinggi, sejalan dengan akselerasi aktivitas masyarakat akibat HBKN dan libur sekolah.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2024 tercatat sebesar 2,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2024 sebesar 2,58% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,51% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan dengan rerata inflasi provinsi Kalimantan Selatan pada periode yang sama selama tiga tahun terakhir sebesar 4,20% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi pada Triwulan II 2024 utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat inflasi terutama didorong oleh tekanan inflasi komoditas daging ayam ras, ikan gabus dan gula pasir utamanya didorong oleh tingginya permintaan pada periode HBKN dan cuti bersama di tengah tingginya harga pakan ternak pada periode sebelumnya serta kebijakan relaksasi HET gula pasir. Tekanan inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya didorong oleh harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren kenaikan harga emas dunia. Meskipun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas, di antaranya ikan tongkol, baju muslim wanita, pepaya, sabun detergen bubuk, ikan peda. Dengan perkembangan pada Juli 2024 serta pergerakan beberapa indikator harga, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan II 2024. Kenaikan tekanan inflasi diperkirakan utamanya didorong oleh kelompok pengeluaran transportasi, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Secara umum, inflasi pada Triwulan III 2024 utamanya didorong oleh sisi penawaran seiring adanya penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi serta resiko la nina dengan curah hujan tinggi. Adapun beberapa komoditas yang

diprakirakan memberikan andil inflasi tahunan pada Triwulan III 2024 di antaranya emas perhiasan, bensin dan rokok.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2024 diprakirakan tetap kuat. Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diperkirakan berada pada batas atas kisaran 4,16% - 4,96% (yoy). Proyeksi ini masih searah dengan prakiraan sebelumnya didorong oleh permintaan domestik dan produksi komoditas utama yang masih tetap kuat dibandingkan dengan prakiraan awal, walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi penawaran, perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja pertambangan dan pertanian. LU Pertambangan diprakirakan melambat sejalan dengan deselerasi produksi batu bara ditengah terbatasnya permintaan negara mitra dagang. LU Pertanian juga diproyeksikan melambat sejalan dengan produksi TBS yang cenderung stagnan di tengah kendala ekstensifikasi pasca moratorium sawit. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja net ekspor dan investasi. Ekspor luar negeri diprakirakan melambat didorong oleh peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik dan moderasi permintaan negara mitra dagang utama sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang masih berkontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Investasi diprakirakan masih tumbuh kuat namun sedikit melambat sejalan dengan perilaku wait and see di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlanjut sehingga berdampak terhadap aliran investasi asing (PMA).

Inflasi Kalimantan Selatan pada keseluruhan 2024, diprakirakan berada pada kisaran sasaran inflasi nasional  $2,5 \pm 1\%$  (yoy). Prakiraan inflasi tersebut terutama didorong oleh kelompok transportasi; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi kelompok transportasi terutama didorong oleh penyesuaian tarif parkir dan harga BBM non-subsidi. Di sisi lain, penambahan rute dan frekuensi penerbangan di tengah peningkatan permintaan akibat meningkatnya mobilisasi masyarakat pascapademi Covid-19 dan dimulainya perpindahan ASN ke IKN, diprakirakan menahan tekanan inflasi kelompok transportasi yang lebih tinggi.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan April 2024**

Pada April 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), meningkat dibanding Maret 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,62% (mtm) serta lebih tinggi dibandingkan inflasi Kalimantan sebesar 0,68% (mtm) dan Nasional sebesar 0,25% (mtm). Kondisi lebih rendah dibandingkan rata-rata historis inflasi April selama 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,66% (mtm). Realisasi inflasi (mtm) tersebut didorong oleh kelompok pengeluaran transportasi, kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 3,00%(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,58% (yoy). Perkembangan inflasi IHK tidak terlepas dari pengaruh sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dalam menurunkan laju inflasi. Realisasi inflasi IHK April 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang disumbang oleh

kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 2,67% (mtm). Peningkatan inflasi kelompok pengeluaran transportasi dipengaruhi oleh penyesuaian tarif parkir, khususnya pada kota Banjarmasin. Kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,82% (mtm) didorong oleh komoditas bawang merah. Lebih lanjut, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 1,98 (mtm) disebabkan oleh komoditas emas perhiasan. Secara keseluruhan, komoditas utama pendorong inflasi bulanan adalah tarif parkir, bawang merah, tomat, emas perhiasan, dan ikan papuyu. Di sisi lain, komoditas penahan inflasi bulanan dikontribusikan oleh kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan andil -0,02% (mtm) khususnya komoditas televisi berwarna

#### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Mei 2023**

Pada Mei 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,01% (mtm), turun dibanding April 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,71% serta lebih rendah dibandingkan inflasi Kalimantan sebesar 0,14% (mtm). Namun demikian, realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar -0,03% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 2,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,00% (yoy). Realisasi IHK Mei 2024 mengalami deflasi, menurun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didorong oleh kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau terutama disumbang oleh komoditas beras serta kelompok pengeluaran transportasi ditopang oleh penurunan tarif angkutan udara. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih mengalami inflasi terutama dari komoditas emas perhiasan. Secara spasial, 2 (dua) dari 5 (lima) kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi. Pada Mei 2024, kota IHK dengan inflasi tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 0,36% (mtm), sedangkan Kab. Hulu Sungai Tengah merupakan kota dengan deflasi bulanan terdalam sebesar 0,78% (mtm). Mencermati perkembangan terkini, tekanan inflasi bulanan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Juni 2024 diperkirakan meningkat. Perkembangan tersebut diperkirakan disebabkan terutama meningkatnya permintaan menjelang HBKN Idul Adha, utamanya pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok pengeluaran transportasi. Kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya diperkirakan masih akan mengalami inflasi sejalan tren kenaikan harga emas dunia.

#### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Juni 2023**

Pada Juni 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,32% (mtm), turun dibanding Mei 2024 yang mengalami deflasi sebesar 0,01% serta lebih rendah dibandingkan Kalimantan yang mengalami deflasi sebesar 0,19% (mtm). Namun demikian, realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar -0,08% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 2,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,63% (yoy). Realisasi IHK Juni 2024 mengalami deflasi, lebih dalam dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didorong oleh kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau terutama disumbang oleh komoditas beras serta kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga ditopang oleh penurunan harga bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya masih mengalami inflasi terutama dari komoditas emas perhiasan. Secara spasial, 4 (empat) dari 5 (lima) kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi. Pada Juni 2024, kota IHK dengan deflasi terdalam terjadi di Kota Banjarmasin sebesar -0,46% (mtm), sementara Kab. Tanah Laut inflasi sebesar 0,01% (mtm). Mencermati perkembangan terkini, tekanan inflasi bulanan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Juli 2024 diperkirakan meningkat. Perkembangan tersebut diperkirakan disebabkan utamanya oleh kelompok pengeluaran pendidikan seiring masuknya siklus tahun ajaran baru sekolah dan perguruan tinggi yang akan dimulai pada minggu ke-2 Juli 2024. Kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya diperkirakan masih akan mengalami inflasi sejalan tren kenaikan harga emas dunia.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### ◦ **Periode April 2024**

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada April 2024 menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah, Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan serta perluasan Kerjasama Antar Daerah. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

#### ◦ Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Pengendalian harga melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan terus diselenggarakan untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting seperti minyak goreng, tepung terigu, beras, bawang, dan telur ayam dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Operasi Pasar di Kota Banjarbaru pada 1, 4 dan 24 April 2024;
  2. Pasar Murah di Kota Banjarbaru pada 2, 3 April 2024;
  3. Pasar Murah di Kab. Kotabaru pada tanggal 2, 3 April 2024; dan
  4. Pasar Murah di Kab. Tanah Laut pada tanggal 2 April 2024.
- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka mendahulukan angkutan logistik pangan.

#### ◦ Upaya Ketersediaan Pasokan

Pasokan Beras pada bulan April 2024 mengalami peningkatan seiring dimulainya masa panen padi di Kab. Tapin. Selain itu, untuk menjamin kecukupan komoditas bawang merah, Kab. Tanah Laut mengadakan KAD dengan Kab. Probolinggo yang telah dilakukan penandatanganan kerja sama pada 2 Mei 2024. Lebih lanjut, Pemkot Banjarmasin juga telah melakukan KAD dengan Brebes dalam rangka pemenuhan pasokan komoditas bawang merah.

#### ◦ Upaya Komunikasi Efektif

Adapun beberapa wujud komunikasi efektif yang telah dilakukan di antaranya adalah kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Mingguan inflasi, High Level Meeting dan Capacity Building. Selama April 2024 telah dilaksanakan Rakor Inflasi Mingguan secara rutin di Command Center Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

- **Periode Mei 2024**

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada Februari 2024 menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah dan Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Pengendalian harga melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan terus diselenggarakan untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting seperti minyak goreng, tepung terigu, beras, bawang, dan telur ayam ras.

- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka prioritas angkutan logistik pangan.

- Upaya Ketersediaan Pasokan

Beberapa upaya pemenuhan kebutuhan pasokan di antaranya melalui pengadaan cadangan beras oleh Bulog melalui importasi langsung dari Vietnam sebanyak 2.650 ton, serta perluasan KAD antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Blitar dalam menjaga ketersediaan pasokan telur ayam dan KAD antara Pemkab Tanah Laut dan Pemkab Probolinggo dalam menjaga ketersediaan pasokan bawang merah.

- Upaya Komunikasi Efektif

Beberapa wujud komunikasi efektif yang telah dilakukan di antaranya adalah kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Mingguan inflasi, High Level Meeting dan Capacity Building. Selama Mei 2024 telah dilaksanakan Rakor Pengendalian Inflasi mingguan di command center Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta HLM oleh TPID Kab. Tabalong, Kota Banjarmasin dan Kab. Tanah Laut

- **Periode Juni 2024**

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada Maret 2024 menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah dan Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Pengendalian harga melalui kegiatan sidak pasar pada beberapa pasar tradisional dalam

rangka memonitoring serta pengendalian ekspektasi masyarakat terhadap harga komoditas pangan seperti minyak goreng, beras, bawang merah, telur ayam ras, serta aneka ikan menjelang HBKN Idul Adha.

- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka prioritas angkutan logistik pangan serta pemberian subsidi ongkos angkut dalam rangka mendukung realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).

- Upaya Ketersediaan Pasokan

Beberapa upaya pemenuhan kebutuhan pasokan di antaranya melalui pengadaan cadangan beras

oleh Bulog melalui importasi langsung dari Vietnam sebanyak 2.000 ton serta pelaksanaan kunjungan ke RPH Banjarmasin dalam rangka monitoring ketersediaan pasokan sapi potong menjelang HBKN Idul Adha.

- Upaya Komunikasi Efektif

Beberapa wujud komunikasi efektif yang telah dilakukan di antaranya adalah kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Mingguan inflasi, High Level Meeting dan Capacity Building. Pada 25 Juni 2024, telah dilaksanakan kegiatan Capacity Building TPID oleh Pemkot Banjarmasin dalam rangka peningkatan wawasan dan penguatan kelembagaan instansi anggota TPID Kota Banjarmasin. Lebih lanjut, pada pelaksanaan Rakornas TPIP, Pemprov. Kalimantan Selatan berhasil memperoleh penghargaan provinsi berkinerja terbaik di kawasan Kalimantan pada TPID Award 2024. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Banjarmasin berhasil memperoleh penghargaan sebagai TPID Kabupaten/Kota terbaik dan Pemkab Hulu Sungai Selatan yang memperoleh nominasi TPID Kabupaten/Kota terbaik pada TPID Award 2024.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang semakin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai stakeholders strategis di daerah. Koordinasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan didukung penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor), dukungan penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah, serta inovasi budidaya tanaman pangan seperti perluasan implementasi program padi apung, program sistem integrasi kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (SISKA KUINTIP) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemanfaatan pupuk batu bara sebagai salah satu alternatif penggunaan pupuk impor yang harganya terus meningkat, serta penyaluran penggunaan bibit unggul yang lebih tahan organisme pengganggu tanaman (OPT). Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bersama dengan Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID provinsi Kalimantan Selatan akan terus

memperkuat respons dan sinergi kebijakan guna memastikan terkendalinya ekspektasi masyarakat dan inflasi sehingga inflasi tetap terjaga dalam kisaran  $2,5 \pm 1\%$ .

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan pemantauan dan peninjauan pasar secara berkala untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Selatan.
- Memperkuat pengawasan barang kebutuhan pokok dengan instansi terkait khususnya Satgas Pangan.
- Memberikan skala prioritas bagi angkutan untuk barang kebutuhan pokok pada setiap SPBU untuk kelancaran distribusi.
- Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah untuk menjaga kestabilan pasokan pangan dalam rangka Pengendalian Inflasi.
- Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID Provinsi maupun dengan TPID Kabupaten/Kota terkait langkah - langkah dalam pengendalian inflasi daerah.
- Melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah TPID Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan kegiatan menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah.
- Melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
- Melakukan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas (Padi Apung).
- Dibutuhkan sinergis dan kolaborasi seluruh anggota TPID dalam mengantisipasi dampak El nino.
- Pelaksanaan High Level Meeting (HLM).
- Pelaksanaan Capacity Building (CB).
- Menambahkan pasokan beras bekerjasama dengan Bulog.
- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada seluruh Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Persiapan Pembuatan Kios Tani binaan Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan cold storage milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Koordinasi Pengembangan Divisi Pangan PT. Bangun Banua untuk menjadi salah satu penyedia kebutuhan pangan di Kalimantan Selatan untuk pengendalian inflasi.
- Mengantisipasi Kenaikan Harga Pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
- Koordinasi rencana kerjasama divisi pangan PT. Bangun Banua dengan Pengelola Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Pengendalian Inflasi
- Melaksanakan MoU antara PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan dengan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM “ maju bersama” yang berada di kabupaten Banjar dan LPM “Karya Bersama “ yang berada di Kabupaten Barito Kuala) dalam hal Penambahan modal pembelian dan pengelolaan gabah petani
- Meningkatkan program pemerintah tentang cetak sawah rakyat secara swakelola sebagai upaya penambahan produksi pangan (beras) melalui peningkatan indeks Pertanaman dan Produktivitas dari lahan sawah exsisting
- Persiapan pembuatan outlet - outlet untuk aktivitas penjualan komoditas pangan oleh Divisi Pangan PT. Bangun Banua
- Pengembangan Kerjasama pola distribusi daging ayam ras dengan Bulog dan Pinsar
- Melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan (DeMaPan) berupa penanganan kerawanan pangan masyarakat
- Peningkatan deversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat berupa bantuan penitipan

gabah di lumbung – lumbung pangan masyarakat